UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Republic Act No. 7309 An Act Creating a Board of Claims Under the Department of Justice for Victims of Unjust Imprisonment or Detention and Victims of Violent Crimes and for Other Purposes.

Revised Implementing Rules and Regulations Republic Act No. 7309 An Act Creating a Board of Claims Under the Department of Justice for Victims of Unjust Imprisonment or Detention and Victims of Violent Crimes and for Other Purposes.

The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven.

B. Buku

Achmadi, Abu dan Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Fernandez Gemmo B., Raphael Pangalangan, Guidote Isabel, dan Ross Tugade. *Philippines: Civil Vindications for Uncivilised Wrongs,* London: Hart Publishing, 2022.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. *Letsellijst Schadefonds Geweldsmisdrijven,* Den Haag: Schadefonds Geweldsmisdrijven, 2018.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. *Policy Manual Caribbean Netherlands Schadefonds Geweldsmisdrijven,* Den Haag: Schadefonds Geweldsmisdrijven, 2019.

ICJR. *Kajian Peluang Kontribusi Negara terhadap Pendanaan Dana Bantuan Korban: Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Dana Bantuan Korban,* Jakarta: ICJR, 2025.

IJRS. *Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: IJRS, 2024.

IJRS. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020), Jakarta: IJRS, 2024.

INFID. *Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: INFID, 2025.

INFID. *Policy Paper Peraturan Pemerintah tentang Sumber, Peruntukan, dan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban TPKS,* Jakarta: INFID, 2022.

Komnas Perempuan. *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Komnas Perempuan. *Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024.

LEIP. *Modul Pelatihan Penerapan Prinsip dan Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Jaksa Penuntut Umum*, Jakarta: Leip, 2022.

LPSK dan IJRS. *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana*, Jakarta: LPSK dan IJRS, 2025.

LPSK dan IJRS. *Peta Jalan Dana Abadi untuk Pemulihan Korban Tindak Pidana di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,* Jakarta: IJRS dan LPSK, 2026.

LPSK. *Laporan Pelaksanaan Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan korban Tahun 2025*, Jakarta: LPSK, 2026.

LPSK. *Laporan Tahunan 2022 Perlindungan Saksi dan Korban untuk Penegakan Hukum,* Jakarta: LPSK, 2023.

LPSK. *Laporan Tahunan 2023 Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital,* Jakarta: LPSK, 2024.

LPSK. *Laporan Tahunan 2024 Perlindungan Saksi dan Korban: Refleksi 2024 dan Prospek Penguatan Akses Keadilan Melalui Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban,* Jakarta: LPSK, 2025.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

Ministerie, Openbaar. *Hoe Krijgt U Uw Schade Betaald?*, Den Haag: Openbaar Ministerie, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitati*f, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Politie. *Victim of a Criminal Offence Your Rights With The Police* , Belanda: Politie, 2024.

Putri, Anggreany Haryani. *Transformasi Perlindungan Saksi dan Korban: Pendekatan Hukum, Psikososial, dan Keadilan Restoratif,* Malang: Madza Media, 2025.

Ridder, J. de. *Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven: Rapport evaluatie ex artikel 39 Kaderwet ZBO,* Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2020.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Santana, Septiawan. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

UNODCCP. *Handbook on Justice for Victims*, New York: UNODCCP, 1999.

Vries, D.J. de. *Schadefonds Geweldsmisdrijven Selectielijst 1976 (Actualisatie 2014)*, Rijswijk: Schadefonds Geweldsmisdrijven, 2014.

C. Artikel Jurnal

Abdillah, Ana dan Erny Herlin Setyorini. "Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (2025): 170-171.

Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana." *Yurika* 33, no. 2 (2018): 262-263.

Antika, Regina Rahma dan Subekti. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi Seksual melalui Sistem *Victim Trust Fund* (Studi Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Belanda)." *Recidive* 13, no. 2 (2024): 229-238.

Firmansyah, Hery dan Lisyah Sun Lisyah. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Korban Atas Biaya Restitusi yang Tidak Terpenuhi Pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1712/Pid.Sus/2021/Pn.Tng." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3593.

Herdiansah, Dian. "Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim trust Fund di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana." *Jurnal Restorative Justice* 9, no. 1 (2025): 5.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ismaidar, Muliyani, Shella, Lucas Butar Butar, Cilcia Pratiwi, Dinda Rahayu Harahap. "Restitusi dalam Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Dasar Hukum, dan Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa."*Jurnal Kebijakan Reformasi* 9, no. 12 (2025): 32.

Kamilah, Izza Faridatu, Nuriyatul Khanifah, dan Mohammad Faizin. "Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif dan Deduktif Perspektif Aristoteles." *Journal Genta Mulia* 15, no. 1 (2023): 134.

Mukti, Shindu Prastu Qildi Wibowo dan Abd. Wachid Habibullah. "Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan Bagi Korban." *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 24.

Noviaman, I Nengah Scopio dan Slamet Haryadi. "Analisis Yuridis Mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 5968.

Nusantara, Abdul Hakim G. "Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat: Perspektif Komparatif." *Jurnal Perlindungan* 4, no. 1 (2014): 17.

Putri, Devi Vanessa Armi, Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Khanza Aoera Dievana, Eka Permana Sakti Irwanto, Aida Jihannisa Haidar, Zaskia Sofi Salsa Bela Laili. "Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 4 (2025): 10.

Putri, Lily Husni dan Maya Permatasari. "Implementasi Pemenuhan Hak Atas Reparasi Bagi Perempuan Korban Konflik Aceh Ditinjau dari Hukum Internasional," *Syiah Kuala Law Journa*l 2, no. 3 (2018): 428.

Rochimi, Laili Tsany Zuriah dan Vita Mahardhika. "Analisis Yuridis Ketidakmampuan Terpidana Membayar Restitusi dalam PP Nomor 29 Tahun 2025 terhadap Perlindungan Hak Korban." *Indonesia Journal of Contemporary Law* 3, no. 2 (2026): 4.

Saputra, Trias dan Yudha Adi Nugraha, "Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 66.

Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 113.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

D. Skripsi

Azzahra, Salsadilla. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Verbal di Media Sosial," Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025.

Zoee, Christina Abigail. "The Prospects of the Victim Trust Fund Model for Sexual Violence in Indonesia," Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

E. Internet

Alfaaddilah. "Presiden Prabowo Teken PP 29/2025, Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara Saat Restitusi Tak Terpenuhi." *LPSK*, 9 Juli 2025. http://www.lpsk.go.id/berita/cmcvm97jv000ndfrefhsvfn3b.

Kabagani, Lade Jean. "DOJ, LandBank Partner to Digitize Aid Payouts for Victims of Injustice." *Daily Tribune*, 7 Juni 2026. https://tribune.net.ph/2026/05/26/doj-landbank-partner-to-digitize-aid-payouts-for-victims-of-injustice.

Cervantes, Filane Mikee. "DOJ Reports Hike in Case Disposition Prosecution Success Rates." *Philippine News Agency*, 5 September 2024. https://www.pna.gov.ph/articles/1232750.

Cervantes, Filane Mikee. "Solon Wants to Increase Compensation for Wrong Convictions," Philippine News Agency, 7 Maret 2023, https://www.pna.gov.ph/articles/1196870.

Chavez, Pot. "DOJ-LBP Accord Intends to Assist Injustice Victims." *Manila Standard*, 26 Mei 2026. https://manilastandard.net/news/314744757/doj-lbp-accord-intends-to-assist-injustice-victims.html.

Damicog, Jeffrey. "DOJ to Seek Amandments to Law on Compensation for Unjust Imprisonment, Victims of Heinous Crime." *Manila Bulletin*, 23 Januari 2026. https://mb.com.ph/2026/01/23/doj-to-seek-amendments-to-law-on-compensation-for-unjust-imprisonment-victims-of-heinous-crimes.

Davina, Nilo T. "Philippines - Claims For Unjust Imprisonment." *Convertus Law*, 30 Juli 2024, https://conventuslaw.com/report/philippines-claims-for-unjust-imprisonment-1/.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Department of Justice Republic of the Philippines. "DOJ - Land Bank Ink Partnership to Ease Claims of Injustice Through Digitalization." *Department of Justice Republic of the Philippines*, 26 Mei 2026. https://www.doj.gov.ph/news_article.html?newsid=xxihti6d57S-RhlMVMu23MLwLn2Matd7i7ZsilVCIgQ.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. "Jaarverslag 2024." *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, 14 Maret 2025. https://www.schadefonds.nl/publicaties/verslag/jaarverslag-2024.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. "Voorwaden." *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, Januari 2020. https://schadefonds.nl/slachtoffer/.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. "Wat Gebeurt Er Als Ik Ook Een Schadevergoeding Krijg." *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, Januari 2020. https://schadefonds.nl/slachtoffer/hoe-werkt-de-betaling/.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. "Wat is het Schadefonds?." *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, Januari 2020. https://schadefonds.nl/schadefonds/.

Geweldsmisdrijven, Schadefonds. "Wie Zijn De Commissieleden Van Het Schadefonds?." *Schadefonds Geweldsmisdrijven*, Januari 2020. https://schadefonds.nl/schadefonds/wie-zijn-de-commissieleden-van-het-schadefonds/.

Hopman, Bas. "Een onrechtmatig gemaximeerde voorschotregeling?," *Letsel Schade Advocaten,* 29 Juni 2022. https://www.sapadvocaten.nl/blog-een-onrechtmatig-gemaximeerde-voorschotregeling/.

ICJR. "Catatan Krusial Terkait PP 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *ICJR*, 1 Juli 2025. https://icjr.or.id/catatan-krusial-terkait-pp-29-2025-tentang-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/.

ICJR. "Perlu Terobosan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, ICJR dan IJRS Dukung Masuknya Mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban dalam RUU TPKS." *ICJR,* 2 Februari 2022. https://icjr.or.id/perlu-terobosan-pemulihan-korban-kekerasan-seksual-icjr-dan-ijrs-dukung-masuknya-mekanisme-victim-trust-fund-atau-dana-bantuan-korban-dalam-ruu-tpks/.

Law, Divina. "Claims For Unjust Imprisonment (1)." *Divina Law*, 29 Juli 2024. https://www.divinalaw.com/dose-of-law/claims-for-unjust-imprisonment-1/.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

LBH APIK. "Pernyataan Sikap LBH APIK Jakarta terhadap Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban (DBK) Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *LBH APIK,* 10 Juli 2025. https://www.lbhapik.org/tulisan-detail/119.

LPSK. "Perkuat Program Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Melalui Kolaborasi Korporasi." *LPSK*, 14 Juni 2024. https://www.lpsk.go.id/berita/clxeixnav00046kbwgar72gll.

Mutakin, Siska. "Mendesak Perbaikan: PP 29/2025 Dana Bantuan Korban TPKS Harus Lebih Inklusif terhadap Kebutuhan Korban." *KBR.id*, 27 Juli 2025. https://kbr.id/articles/ragam/mendesak-perbaikan-pp-29-2025-dana-bantuan-korban-tpks-harus-lebih-inklusif-terhadap-kebutuhan-perempuan.

Nurhidayat, Despian. "PP 29/2025 Jadi Jalan Korban Kekerasan Seksual Dapat Pengobatan." *Media Indonesia*, 1 Agustus 2025. https://mediaindonesia.com/humaniora/797172/pp-292025-jadi-jalan-korban-kekerasan-seksual-dapat-dana-pengobatan.

Nurita, Dewi. "Skema Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual Masuk RUU TPKS." *Tempo,* 31 Maret 2022. https://www.tempo.co/politik/skema-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-masuk-ruu-tpks-411391.

Ombudsman RI. "Menanti Realisasi Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Ombudsman RI*, 14 Juli 2025. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--menanti-realisasi-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual.

Overheid.nl. "Brief Van De Staatssecretaris Van Justitie In Veiligheid," Overheid.nl, 19 September 2025. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33552-151.html.

Porcalla, Delon. "Bill Seeking to Increase Compensation for Wrong Convictions Fields." *The Philippine Star*, 10 Maret 2023. https://www.philstar.com/nation/2023/03/10/2250508/bill-seeking-increase-compensation-wrong-convictions-filed.

Pulta, Benjamin. "Time to Raise Compensation for Heinous Crime Victims: DOJ." *Philippine News Agency*, 6 September 2021. https://www.pna.gov.ph/articles/1152685.

Respicio & Co. "Victim Compensation Demand During Criminal Investigation Philippines." *Respicio & Co*, 24 Juni 2025. https://www.respicio.ph/commentaries/victim-compensation-demand-during-criminal-investigation-philippines.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Pengaturan Pemanfaatan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia:
Pembelajaran dari Belanda dan Filipina**
Lusia Rina Wulandari, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ridwan, Muhammad. "Presiden Teken PP TPKS, Korban Kekerasan Seksual Berhak Dapat Bantuan Negara Saat Restitusi Tak Terpenuhi." *Jawa Pos,* 8 Juli 2025. https://www.jawapos.com/nasional/016241189/presiden-teken-pp-tpks-korban-kekerasan-seksual-berhak-dapat-bantuan-negara-saat-restitusi-tak-terpenuhi.

Smartengeld. "Schadefonds Geweldsmidrijven." *Smartengeld*, 2026. https://www.smartengeld.nl/artikel/schadefonds-geweldsmisdrijven-1.

Torres, Tetch. "DOJ Back Bill Raising Compensationf for Wrongful Conviction." *INQUIRER*, 14 Maret 2024, https://newsinfo.inquirer.net/1918674/board-of-claims.

Yasin, Muhammad. "Perlu dilakukan Kontrol Preventif terhadap Peraturan Delegasi." *hukumonline.com,* 16 Desember 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-dilakukan-kontrol-preventif-terhadap-peraturan-delegasi-lt5fd99e83063de/.